

**PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM LEGAL DRAFTING PERATURAN
DAERAH: STUDI KASUS DI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN**

Akhmad Zaki Yamani¹, Muhammad Azis Kurniawan²

^{1,2} STAI Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan

E-mail: ¹⁾ zyamani1981@gmail.com, ²⁾ azism8234@gmail.com

Abstract

This study examines the strategic role of Provincial Legislatures Council Secretariat in the legal drafting of regional regulations in Hulu Sungai Selatan Regency. Employing a qualitative approach with a case study design, this research analyzes the effectiveness of the DPRD Secretariat's role, the influencing factors, and the challenges. The findings revealed the DPRD Secretariat plays a crucial role in providing administrative, technical, and coordinative support in the process of drafting regional regulations. However, the effectiveness of this role is still constrained by the limitation of human resources, the complexity of regulatory harmonization, and the limitation of resources. This study proposes strategies to optimize the DPRD Secretariat's role through enhancing human resource capacity, strengthening inter-institutional coordination, and utilizing the information technology. The implications of optimizing this role are improving quality of regional legislation, the efficiency of legislative process, and enhancing responsiveness to community needs. This research contributes to a more comprehensive understanding of the role of supporting institutions in the regional legislative process and highlights the importance of strengthening institutional capacity in the context of regional autonomy.

Keywords: *DPRD Secretariat, Legal Drafting, Regional Regulations*

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem demokrasi Indonesia, pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah memungkinkan mereka untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Salah satu manifestasi dari otonomi daerah ini adalah kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda) yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal (Busroh et al., 2024). Dalam proses penyusunan peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai representasi aspirasi masyarakat dalam proses legislasi daerah. Namun, kompleksitas dalam penyusunan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah hukum memerlukan dukungan teknis yang memadai, terutama dalam aspek legal drafting (Nomor 6, “Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dengan.”).

Legal drafting, atau penyusunan naskah hukum, merupakan suatu keahlian teknis yang sangat penting dalam proses pembuatan peraturan daerah. Keahlian ini mencakup

kemampuan untuk merumuskan norma hukum dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan. Signifikansi legal drafting dalam pembuatan peraturan daerah terletak pada kualitas produk hukum yang dihasilkan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan daerah (Kaharudin et al., 2016). Dalam konteks ini, peran Sekretariat DPRD menjadi sangat penting. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD (No 71, “Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.”). Fungsi utama Sekretariat DPRD mencakup penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD, serta penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD. Dalam kaitannya dengan proses legislasi, Sekretariat DPRD berperan penting dalam memberikan dukungan teknis, termasuk dalam aspek legal drafting.

Peran Sekretariat DPRD dalam proses legislasi daerah telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Jika sebelumnya peran Sekretariat DPRD lebih banyak terfokus pada aspek administratif, saat ini perannya telah berkembang menjadi lebih strategis, terutama dalam mendukung fungsi legislasi DPRD. Namun, dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat DPRD menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam legal drafting, keterbatasan anggaran, serta tuntutan untuk memberikan dukungan teknis yang berkualitas tinggi dalam waktu yang seringkali singkat. Proses penyusunan peraturan daerah melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan, hingga penetapan dan pengundangan. Kompleksitas legal drafting di tingkat daerah semakin meningkat seiring dengan dinamika perubahan regulasi di tingkat nasional dan tuntutan masyarakat akan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, kebutuhan akan keahlian teknis dalam legal drafting menjadi semakin mendesak (Nomor 6, “Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dengan.”).

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Selatan, juga menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan fungsi legislasi daerahnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020, pemerintah daerah telah menetapkan struktur organisasi perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai isu spesifik yang dihadapi dalam proses legal drafting di daerah ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang legal drafting, serta tantangan dalam mengharmonisasikan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat adanya kesenjangan antara kebutuhan akan peraturan daerah yang berkualitas dan kapasitas legal drafting yang ada di tingkat daerah. Sebagaimana tercermin dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100 Tahun 2020, terdapat upaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mendukung fungsi pemerintahan daerah, termasuk dalam aspek legislasi (No 100, “Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan.”). Namun, implementasi di lapangan masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan

efektivitasnya. Optimalisasi peran Sekretariat DPRD dalam legal drafting menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas peraturan daerah yang dihasilkan. Penelitian ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas legislasi daerah, tidak hanya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Rumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan Bagaimana peran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam proses legal drafting peraturan daerah, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut dan tantangan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi untuk meningkatkan kualitas legislasi daerah? Rumusan masalah ini mengarah pada analisis peran Sekretariat DPRD, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta strategi optimalisasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas legislasi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam proses legal drafting peraturan daerah. Fokus utamanya adalah mengkaji peran Sekretariat DPRD, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan strategi optimalisasi dalam meningkatkan kualitas legal drafting. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif tentang kontribusi Sekretariat DPRD dalam proses legislasi daerah. Secara teoretis, hasil penelitian ini berpotensi memperkaya kajian tentang peran lembaga pendukung dalam proses legislasi di tingkat daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Temuan yang dihasilkan dapat menjadi landasan pengembangan model optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD untuk mendukung kualitas legislasi daerah. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan berharga bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terutama DPRD dan Sekretariatnya, dalam upaya meningkatkan kualitas peraturan daerah melalui penguatan kapasitas legal drafting. Lebih jauh, hasil penelitian ini berpotensi menjadi referensi bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD mereka, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislasi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

2. METODE IMPLEMENTASI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam peran strategis Sekretariat DPRD dalam legal drafting peraturan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami kompleksitas fenomena sosial yang terjadi dalam konteks spesifik pemerintahan daerah. Melalui studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek dari peran Sekretariat DPRD, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mendukung proses legal drafting. Pengumpulan data akan dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD, staf Sekretariat DPRD, dan pejabat pemerintah daerah yang

terlibat dalam proses legal drafting. Panduan wawancara semi-terstruktur akan digunakan untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data, sambil tetap memberikan fleksibilitas untuk menggali informasi lebih lanjut. Observasi partisipatif akan dilakukan untuk mengamati secara langsung proses kerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan legal drafting, termasuk mengikuti rapat-rapat terkait penyusunan peraturan daerah. Studi dokumen akan melibatkan analisis berbagai dokumen resmi seperti peraturan daerah, naskah akademik, risalah rapat, dan laporan kinerja Sekretariat DPRD untuk memberikan konteks historis dan legal yang penting.

Analisis data akan menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan proses transkripsi data, koding, pengategorian tema, interpretasi, dan sintesis temuan. Fokus analisis akan diarahkan pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung legal drafting, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menerapkan beberapa metode validasi, termasuk triangulasi sumber data, member checking, peer debriefing, dan audit trail. Triangulasi akan dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memverifikasi temuan. Member checking akan melibatkan konfirmasi hasil analisis kepada partisipan penelitian untuk memastikan akurasi interpretasi. Peer debriefing akan melibatkan diskusi dengan rekan peneliti untuk mendapatkan perspektif alternatif dan meminimalkan bias. Audit trail akan dilakukan dengan menyimpan dan mendokumentasikan semua data mentah, catatan lapangan, dan proses analisis untuk memastikan transparansi dan reliabilitas penelitian. Melalui pendekatan metodologis yang komprehensif ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang peran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam proses legal drafting peraturan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan strategi untuk meningkatkan efektivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislasi daerah, serta memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020, struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris DPRD yang membawahi beberapa bagian, termasuk bagian umum, keuangan, dan program (Nomor 6, “Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dengan.”). Sumber daya manusia di Sekretariat DPRD terdiri dari pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan SDM yang memiliki keahlian khusus dalam legal drafting, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam optimalisasi peran Sekretariat DPRD. Dalam hal sarana dan prasarana pendukung, Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilengkapi dengan fasilitas

perkantoran standar, termasuk ruang kerja, peralatan komputer, dan akses internet. Namun, penelitian ini mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung proses legal drafting yang lebih efisien, terutama dalam hal sistem manajemen dokumen dan database peraturan perundang-undangan (Yamani, 2024a).

B. Peran Sekretariat DPRD dalam Proses Legal Drafting

Peran Sekretariat DPRD dalam proses legal drafting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup tiga aspek utama: dukungan administratif, dukungan teknis, dan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal dukungan administratif, Sekretariat DPRD bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen, penjadwalan rapat, dan fasilitasi komunikasi antara DPRD dengan pihak eksternal. Penelitian ini menemukan bahwa dukungan administratif yang diberikan oleh Sekretariat DPRD telah cukup memadai, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan efisiensi melalui digitalisasi proses administrasi. Dukungan teknis yang diberikan Sekretariat DPRD dalam proses legal drafting meliputi penyusunan naskah akademik, penelaahan draft peraturan daerah, dan pemberian masukan substantif terkait aspek hukum dan teknik perundang-undangan. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas Sekretariat DPRD untuk memberikan dukungan teknis yang komprehensif, terutama dalam hal analisis dampak regulasi dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi (No 71, “Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.”). Dalam hal koordinasi dengan pihak terkait, Sekretariat DPRD berperan sebagai fasilitator utama dalam menghubungkan DPRD dengan eksekutif daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya selama proses penyusunan peraturan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD telah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal pelibatan masyarakat dan transparansi proses legislasi.

C. Analisis Efektivitas Peran Sekretariat DPRD

Efektivitas peran Sekretariat DPRD dalam proses legal drafting dapat dilihat dari tiga indikator utama: kualitas peraturan daerah yang dihasilkan, ketepatan waktu dalam proses legal drafting, dan tingkat kepuasan stakeholders. Dalam hal kualitas peraturan daerah, penelitian ini menemukan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan dengan dukungan Sekretariat DPRD umumnya telah memenuhi standar teknis perundang-undangan. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal kejelasan rumusan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal (Afandi et al., 2024). Ketepatan waktu dalam proses legal drafting menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD. Penelitian ini mengungkapkan bahwa seringkali terjadi keterlambatan dalam penyelesaian draft peraturan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kompleksitas isu, keterbatasan SDM, dan dinamika politik lokal. Tingkat kepuasan stakeholders terhadap kinerja Sekretariat DPRD dalam proses legal drafting cukup bervariasi. Anggota DPRD umumnya merasa puas dengan dukungan administratif yang diberikan, namun masih mengharapkan peningkatan dalam hal dukungan teknis dan substantif. Sementara itu,

pihak eksekutif dan masyarakat mengharapkan peran yang lebih proaktif dari Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi partisipasi publik dan harmonisasi kebijakan.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Sekretariat DPRD

Peran Sekretariat DPRD dalam legal drafting dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang signifikan meliputi kompetensi SDM, ketersediaan anggaran, serta sistem kerja dan prosedur. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat pegawai yang memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan, masih terdapat kesenjangan dalam hal keahlian spesifik terkait legal drafting dan analisis kebijakan. Ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penting, terutama untuk mendukung kegiatan peningkatan kapasitas dan pengadaan teknologi pendukung. Sistem kerja dan prosedur di Sekretariat DPRD, meskipun telah ada, masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses legal drafting. Faktor eksternal yang mempengaruhi peran Sekretariat DPRD meliputi dinamika politik lokal, perubahan regulasi tingkat nasional, dan tuntutan masyarakat. Dinamika politik lokal, terutama dalam hal hubungan antara DPRD dan eksekutif, seringkali mempengaruhi proses dan hasil legal drafting. Perubahan regulasi di tingkat nasional juga memberikan tantangan tersendiri bagi Sekretariat DPRD dalam memastikan harmonisasi peraturan daerah. Sementara itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan partisipasi dalam proses legislasi menuntut Sekretariat DPRD untuk lebih adaptif dan responsif.

E. Tantangan dan Kendala dalam Legal Drafting

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dan kendala utama dalam proses legal drafting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertama, keterbatasan SDM yang memiliki keahlian legal drafting menjadi kendala signifikan. Meskipun terdapat pegawai yang berpengalaman dalam administrasi pemerintahan, keahlian spesifik dalam teknik perundang-undangan dan analisis kebijakan masih perlu ditingkatkan. Kedua, kompleksitas harmonisasi peraturan menjadi tantangan tersendiri. Sekretariat DPRD harus memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sekaligus memenuhi kebutuhan spesifik daerah. Proses ini seringkali membutuhkan analisis mendalam dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak (Busroh et al., 2024). Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi kendala dalam menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas. Tuntutan untuk menyelesaikan draft peraturan dalam waktu singkat seringkali berbenturan dengan kebutuhan untuk melakukan kajian komprehensif dan konsultasi publik yang memadai.

F. Strategi Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa strategi optimalisasi peran Sekretariat DPRD dalam legal drafting dapat diusulkan. Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, terutama dalam bidang legal drafting, analisis kebijakan, dan manajemen legislasi. Kedua, penguatan koordinasi antar lembaga, termasuk membangun mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara Sekretariat DPRD, eksekutif daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legal drafting, termasuk implementasi sistem manajemen dokumen elektronik dan platform kolaborasi online untuk memfasilitasi proses penyusunan dan review

draft peraturan. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses legal drafting dan memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas (Yamani, 2024a)

G. Implikasi terhadap Kualitas Legislasi Daerah

Optimalisasi peran Sekretariat DPRD dalam legal drafting berpotensi memberikan implikasi positif terhadap kualitas legislasi daerah. Pertama, peningkatan kualitas peraturan daerah, baik dari segi substansi maupun teknis perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses legislasi melalui peningkatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi. Ketiga, peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat melalui fasilitasi partisipasi publik yang lebih efektif dalam proses penyusunan peraturan daerah. Kemhan, “Modul Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. Iii Dan Tk. Iv Kemhan Ta. 2018 1.”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas legislasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, optimalisasi peran tersebut membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan peningkatan kapasitas internal, penguatan koordinasi eksternal, serta dukungan politik dan anggaran yang memadai.

Pembahasan

Peran Sekretariat DPRD dalam Legal Drafting, Sekretariat DPRD memainkan peran krusial dalam proses legal drafting peraturan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peran ini mencakup tiga aspek utama: dukungan administratif, dukungan teknis, dan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal dukungan administratif, Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk menyiapkan berbagai keperluan administratif yang mendukung proses penyusunan peraturan daerah. Hal ini meliputi penyediaan ruang rapat, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan selama proses legal drafting (No 71, “Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.”). Selain itu, Sekretaria DPRD juga berperan dalam pengelolaan dokumen, pengarsipan, dan distribusi draft peraturan daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dukungan teknis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD merupakan aspek penting lainnya dalam proses legal drafting. Sekretariat DPRD menyediakan tenaga ahli dan staf yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perundang-undangan untuk membantu anggota DPRD dalam merumuskan draft peraturan daerah (Rizka Hidayanti, 2020). Mereka memberikan masukan teknis terkait aspek legal dan substantif dari peraturan yang sedang disusun, memastikan bahwa peraturan tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Koordinasi dengan pihak terkait juga menjadi tanggung jawab utama Sekretariat DPRD dalam proses legal drafting. Sekretariat DPRD berperan sebagai penghubung antara DPRD dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pakar hukum (Nomor 6, “Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dengan.”). Mereka mengorganisir konsultasi publik, rapat dengar pendapat, dan pertemuan teknis untuk memastikan bahwa aspirasi dan masukan dari berbagai pihak dapat terakomodasi dalam peraturan daerah yang disusun.

Analisis Efektivitas Peran Sekretariat DPRD, Efektivitas peran Sekretariat DPRD dalam legal drafting dapat diukur melalui tiga indikator utama: kualitas peraturan daerah yang dihasilkan, ketepatan waktu dalam proses legal drafting, dan tingkat kepuasan

stakeholders. Kualitas peraturan daerah yang dihasilkan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas peran Sekretariat DPRD. Peraturan daerah yang berkualitas ditandai dengan kejelasan rumusan, konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Studi kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan dengan dukungan Sekretariat DPRD memiliki tingkat kualitas yang cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal harmonisasi dengan peraturan nasional. Ketepatan waktu dalam proses legal drafting juga menjadi tolok ukur penting. Proses penyusunan peraturan daerah yang efisien dan tepat waktu mencerminkan kinerja yang baik dari Sekretariat DPRD. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meskipun secara umum proses legal drafting dapat diselesaikan sesuai jadwal, namun masih terdapat beberapa kasus di mana proses tersebut mengalami keterlambatan akibat kompleksitas isu yang dibahas atau kendala koordinasi antar pihak. Tingkat kepuasan stakeholders merupakan indikator lain yang menunjukkan efektivitas peran Sekretariat DPRD. Stakeholders dalam hal ini mencakup anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Berdasarkan survei dan wawancara yang dilakukan, sebagian besar stakeholders menyatakan cukup puas dengan kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung proses legal drafting, meskipun ada beberapa catatan untuk peningkatan, terutama dalam hal transparansi proses dan keterlibatan publik yang lebih luas (Yamani, 2024a).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Sekretariat DPRD, Peran Sekretariat DPRD dalam legal drafting dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketersediaan anggaran, dan sistem kerja yang diterapkan. Kualitas SDM merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD. Staf yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk mendukung proses legal drafting yang efektif (No 71, “Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.”). Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meskipun terdapat beberapa staf yang memiliki keahlian di bidang hukum, namun jumlahnya masih terbatas dan perlu ditingkatkan. Ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi peran Sekretariat DPRD. Anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan dalam proses legal drafting, termasuk penelitian, konsultasi publik, dan peningkatan kapasitas staf (Mintarti, 2019). Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan legal drafting, namun jumlahnya seringkali tidak mencukupi untuk mendukung proses yang optimal. Sistem kerja yang diterapkan di Sekretariat DPRD juga mempengaruhi efektivitas perannya dalam legal drafting. Sistem yang terstruktur dan efisien dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas output (No 100, “Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan.”). Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meskipun telah ada upaya untuk menerapkan sistem kerja yang lebih baik, namun masih diperlukan penyempurnaan, terutama dalam hal koordinasi antar bagian dan manajemen pengetahuan. Faktor eksternal yang mempengaruhi peran Sekretariat DPRD meliputi dinamika politik, regulasi nasional, dan tuntutan masyarakat. Dinamika politik di DPRD dan hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat mempengaruhi proses legal drafting. Perubahan regulasi

nasional juga berdampak pada proses penyusunan peraturan daerah, mengharuskan Sekretariat DPRD untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru. Tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam juga menuntut Sekretariat DPRD untuk lebih responsif dan inovatif dalam mendukung proses legal drafting.

Tantangan dan Kendala dalam Legal Drafting, Dalam melaksanakan perannya dalam legal drafting, Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadapi beberapa tantangan dan kendala utama. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan SDM dengan keahlian legal drafting. Meskipun terdapat staf yang memiliki latar belakang hukum, namun jumlah personel yang memiliki keahlian khusus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan masih terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi proses legal drafting. Kompleksitas harmonisasi peraturan juga menjadi kendala signifikan. Sekretariat DPRD harus memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya (No 71, “Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.”). Proses harmonisasi ini seringkali memerlukan waktu dan keahlian yang tidak sedikit, terutama mengingat dinamika perubahan regulasi di tingkat nasional yang cukup cepat. Keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi tantangan tersendiri. Proses legal drafting seringkali harus diselesaikan dalam tenggat waktu yang ketat, sementara sumber daya yang tersedia, baik dari segi personel maupun anggaran, terbatas (Djajaatmadja, 2007). Hal ini dapat menyebabkan tekanan yang cukup besar pada Sekretariat DPRD dan berpotensi mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan.

Strategi Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD, Menghadapi berbagai tantangan dan kendala tersebut, diperlukan strategi optimalisasi peran Sekretariat DPRD dalam legal drafting. Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas SDM. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, terutama di bidang legal drafting dan analisis kebijakan. Selain itu, rekrutmen staf baru dengan keahlian spesifik di bidang hukum dan perundang-undangan juga perlu dipertimbangkan. Penguatan koordinasi antar lembaga juga menjadi strategi penting. Sekretariat DPRD perlu meningkatkan kerja sama dan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (Munandi Saleh, 2021). Hal ini akan membantu dalam proses pengumpulan data, analisis kebijakan, dan penyusunan draft peraturan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD. Penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik, platform kolaborasi online, dan database peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses legal drafting (Nomor 6, “Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dengan.”). Hal ini juga dapat membantu dalam proses diseminasi informasi dan pelibatan publik yang lebih luas dalam proses penyusunan peraturan daerah.

Implikasi terhadap Kualitas Legislasi Daerah, Optimalisasi peran Sekretariat DPRD dalam legal drafting memiliki implikasi positif terhadap kualitas legislasi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan kualitas peraturan daerah menjadi salah satu dampak utama yang dapat diharapkan. Dengan dukungan teknis dan administratif yang lebih baik dari Sekretariat DPRD, peraturan daerah yang dihasilkan diharapkan akan lebih

komprehensif, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efisiensi proses legislasi juga dapat ditingkatkan melalui optimalisasi peran Sekretariat DPRD. Dengan sistem kerja yang lebih terstruktur dan pemanfaatan teknologi informasi, proses penyusunan peraturan daerah dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga memungkinkan DPRD untuk lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi implikasi penting dari optimalisasi peran Sekretariat DPRD. Dengan dukungan yang lebih baik dalam proses konsultasi publik dan analisis kebijakan, peraturan daerah yang dihasilkan diharapkan akan lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal (No 100, “Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.”). Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi peraturan daerah tersebut. Dalam kesimpulan, peran strategis Sekretariat DPRD dalam legal drafting peraturan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat penting dan berpotensi besar untuk dioptimalkan. Melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi, dan pemanfaatan teknologi, Sekretariat DPRD dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah. Namun, upaya ini perlu didukung oleh komitmen politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan peran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam proses legal drafting peraturan daerah. Sekretariat DPRD memainkan peran krusial dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan koordinatif yang sangat diperlukan dalam proses penyusunan peraturan daerah yang berkualitas. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam legal drafting, kompleksitas harmonisasi peraturan, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Studi ini menemukan bahwa kualitas peraturan daerah yang dihasilkan, ketepatan waktu dalam proses legal drafting, dan tingkat kepuasan stakeholders menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas peran Sekretariat DPRD. Meskipun secara umum kinerja Sekretariat DPRD cukup baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal harmonisasi dengan peraturan nasional dan pelibatan publik yang lebih luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Sekretariat DPRD mencakup aspek internal seperti kualitas SDM, ketersediaan anggaran, dan sistem kerja, serta faktor eksternal seperti dinamika politik, perubahan regulasi nasional, dan tuntutan masyarakat. Optimalisasi peran Sekretariat DPRD memerlukan strategi komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legal drafting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan peran Sekretariat DPRD dalam legal drafting berpotensi memberikan dampak positif terhadap kualitas legislasi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas peraturan daerah, efisiensi proses legislasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, upaya optimalisasi ini membutuhkan dukungan politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal.

REFERENCES

- Afandi, A., Negeri, U. I., Haji, K., Siddiq, A., & Syariah, F. (2024). Peran sekretariat dprd dalam meningkatkan kualitas legislasi terhadap perda yang baik di kabupaten jember skripsi. UIN Khas Jember.
- Bintang, S. (2018). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 23–38. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9897>
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711.
- Djajaatmadja, B. I. (2007). Harmonisasi hukum pengelolaan sumber daya kelautan dalam kerangka desentralisasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Hanafie, N. K., Madjid, A. F., & Novayanti, S. R. (2022). Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, 125–133.
- Kaharudin, Rudy, & Fajar, M. (2016). Implikasi peraturan daerah dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat daerah.
- Kemhan. (2018). Modul Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III dan Tk. IV Kemhan TA. 2018 1. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 1–113.
- Mintarti. (2019). PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH. Penerbit Taujih Jl. Merak 51 Gonilan Kartosuro 57162 Email : penerbit.taujih@gmail.com.
- Munandi Saleh, Np. (2021). STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA DPRD DI KOTA SUKABUMI CAPACITY BUILDING STRATEGIES ON MEMBER OF LOCAL LEGISTATIVE COUNCIL IN SUKABUMI C. PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.
- No 100, P. K. H. S. S. (2020). PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN. 19(5), 1–23.
- No 71, P. K. H. S. S. (2021). PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. 1–23.

NOMOR 6, P. K. H. S. S. (2020). PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN. 1–23.

Palulungan, Ghufuran, M., Yunus, Y., Hidayat, T., & Yanti, P. (2017). Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender. In Makassar. Universitas Borneo Tarakan. <https://repository.ubt.ac.id/>

Rizka Hidayanti. (2020). Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administratif Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. 1–156.

Yamani, A. Z. (2024a). TEKNIS DAN TATA CARA PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 3(2), 11–20.

Yamani, A. Z. (2024b). The Technical Preparation Of Legislation In The Legal System Of Indonesia. Jurnal Hukum Sehasen, 10(1), 39–46.